

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah Kota Cirebon menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 dan penyusunan aturan turunannya. Upaya nyata dilakukan melalui program pemberian alat bantu, pelatihan teknisi dan tata boga, konseling spiritual, serta Pertemuan Penguatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pemerintah juga memperkuat layanan sosial dengan membentuk Puskesmas di tiap kelurahan dan meningkatkan infrastruktur aksesibilitas di fasilitas publik seperti transportasi umum, sekolah, tempat ibadah, dan pusat perbelanjaan. Kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan masyarakat, organisasi disabilitas, dan pekerja sosial masyarakat, juga penting dalam memastikan keberlanjutan program dan menjadikan penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan yang aktif.
2. Mekanisme pengawasan dalam keberlanjutan dan efektivitas pembinaan penyandang disabilitas, yaitu: peran aktif Dinas Sosial Kota Cirebon dalam rehabilitasi sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas; layanan bimbingan fisik, mental, sosial, dan pendampingan administratif; keberadaan rumah singgah sebagai tempat rehabilitasi awal; pengawasan berbasis data melalui DTKS untuk mencegah tumpang tindih bantuan; serta koordinasi lintas sektor dengan organisasi disabilitas, LSM, sektor kesehatan, pendidikan, dan Puskesmas untuk meningkatkan efektivitas pemantauan. Selain itu, evaluasi dan monitoring rutin dilakukan guna memastikan program pembinaan tepat sasaran dan menjangkau seluruh penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebaiknya terus memperkuat pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2023 dengan percepatan penerbitan dan sosialisasi Peraturan Wali Kota sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, serta memastikan seluruh program pemberdayaan dan aksesibilitas berjalan secara merata dan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu menambah fasilitas yang masih belum tersedia seperti guiding block, papan informasi braille, dan lift disabilitas, agar aksesibilitas benar-benar inklusif. Selain itu, penting untuk terus melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program guna menjamin program benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Kolaborasi lintas sektor dan penguatan peran masyarakat juga harus dipertahankan agar terbentuk ekosistem yang mendukung kemandirian penyandang disabilitas secara menyeluruh.
2. Untuk memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program pembinaan penyandang disabilitas, disarankan agar Dinas Sosial Kota Cirebon tidak hanya mengandalkan pendekatan administratif dan data DTKS, tetapi juga memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem monitoring dan evaluasi berbasis real-time. Dengan memanfaatkan aplikasi pelaporan lapangan dan umpan balik langsung dari masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan keluarganya, pengawasan bisa lebih responsif dan transparan. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan berkala bagi petugas lapangan dan pendamping disabilitas agar mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan khusus dan perubahan kondisi di lapangan secara tepat. Evaluasi tahunan yang melibatkan lintas sektor dan forum penyandang disabilitas juga penting untuk menilai efektivitas program serta merumuskan strategi peningkatan berbasis temuan lapangan dan aspirasi komunitas.